

# DIPLOMASI INDONESIA DALAM PENANGANAN KONFLIK ROHINGYA 2013-2017

Author: Rara Zulfa

(Email: Rzulfadasma@gmail.com)

Pembimbing: Saiman Pakpahan, S.IP, M.Si

Bibliografi: 14 Jurnal, 20 Buku, 2 Skripsi, 2 Key Informan, 44 Website

**Jurusan Ilmu Hubungan Internasional – Prodi Ilmu Hubungan  
Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau  
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru  
28293**

## ***Abstract***

*This Research aimed to explain Indonesian Diplomacy prevention to Rohingya conflict in 2013-2017. The prolonged ethnicity conflict in Rohingya made Indonesian Government and Indonesian Society took a step to handle this conflict. With various powerful news about this conflict where ethnic Rohingya were tortured in daily basis caused international would give more responses to this conflict. Indonesian as an ASEAN country uphold world justice certainly performed some efforts to overcome this conflict. Indonesian as a neighboring country of Myanmar and has some closeness of several things tried hard to do approach in order to perform prevention of this conflict.*

*This research used Neorealism perspective. Neorealism assumes that all world problematic can be solved by working together. If it connected to neorealism, Indonesian entered the Myanmar International Anarchy System. Furthermore, Indonesian, Myanmar and International NGO pulled together to give human aids to Rohingya society. In addition, this research was supported by diplomacy theory in which the writer used Multi Track Diplomacy and choose three tracks for this research, there are : Track 1 Government, track 2 NGO, and track 9 media. level of analysis that was being used was Analysis of nation state. The writer used qualitative method and data collection of interview and literature study.*

*This research showed Indonesia's diplomacy which used human aids to overcome the conflict of Rohingya ethnic in Myanmar using Track 1 of Government, Track 2 of NGO, and Track 9 of Media*

***Keywords: Conflict, Rohingya Ethnic, Diplomacy, Multi-Track Diplomacy***

## Pendahuluan

Konflik biasanya sering dihubungkan dengan berbagai hal seperti adanya tidak kekerasan oleh kedua belah pihak yang bertikai, timbulnya aksi diplomasi dan aksi militer, adanya posisi yang tidak seimbang dalam sebuah isu, dan adanya perilaku yang tidak bersahabat dalam suatu negara<sup>1</sup> penyebab terjadinya konflik pun bermacam-macam, beberapa diantaranya seperti menggulingkan kekuasaan suatu pemerintah, mendapatkan aliansi, mendapatkan kontrol atas sumber daya yang berharga, mendapatkan keamanan, dan menambah wilayah atau mendapatkan wilayah yang lebih aman<sup>2</sup> Pada penelitian kali ini penulis ingin berbicara mengenai konflik etnis yang terjadi di negara Myanmar yang menimpa 2 etnis yaitu Rohingya dan Rakhine.

Etnis Rohingya adalah penduduk Muslim asli negara bagian Arakan, merupakan keturunan dari campuran orang Bengali, Persia, Mongol, Turki, Melayu, Arab dan menjadi penduduk minoritas di Arakan. Setelah kemerdekaan Burma (Myanmar) populasi etnis Rohingya terus berusaha dikurangi, melalui beberapa tindakan mulai dari pengusiran hingga pembunuhan, sampai saat ini hanya tersisa sedikit etnis Muslim Rohingya di Arakan, karena populasi etnis Rohingya terpojok di bagian utara Arakan.<sup>3</sup> Pada dasarnya konflik yang terjadi antara Rohingya

dan Rakhine ini lebih menjerumuskan kepada etnis bukan agama.

Yang kebetulan Rohingya minoritas beragama Islam dan Rakhine mayoritas beragama Budha. Mengingat bahwa etnis Rohingya telah ditindas selama puluhan tahun oleh negaranya sendiri maupun kaum mayoritas yang dimana mereka dianggap berbeda dari segi fisik, bahasa, dan agama. ini bukan permasalahan budha dan islam, melainkan permasalahan etnis dimana pemerintahan myanmar yang tidak menerima keberadaan rohingya dinegara mereka. Kekerasan ini menurut catatan sejarah sudah terjadi selang beberapa dekade lalu bahkan mengakibatkan ribuan orang meninggal dunia dan 140 ribu terusir dari rumah mereka di daerah Rakhine, serta 800 ribu masyarakatnya tidak mempunyai kewarganegaraan<sup>4</sup> Aksi diskriminasi yang dilakukan oleh Myanmar inilah yang mendorong banyak negara mengutuk dan mengecam Myanmar atas aksi yang dilakukan terhadap masyarakat Rohingya. Peran media masa yang menjadi sumber informasi telah memberikan dorongan bagi indonesia untuk membantu masyarakat Rohingya. Disini Indonesia menggunakan jalur diplomasi untuk membantu penanganan konflik tersebut.

Diplomasi dijalankan dengan beragam metode, melibatkan berbagai macam media, teknik dan strategi serta seni menjalankan kekuasaan. Tiap-tiapnya memiliki kegunaan sesuai konteks, kebutuhan, dan sasaran yang

---

<sup>1</sup> Holsty. K.J. 1992. *International Politics : A Framework For Analysis Sixth Edition*. New Jersey : Prentice. Hall. Hal 348.

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> [http://ji-indonesia.com/pipermail/an-nuur\\_ji-indonesia.com/2009-February/001364.html](http://ji-indonesia.com/pipermail/an-nuur_ji-indonesia.com/2009-February/001364.html) diakses pada 30 Desember 2017 pukul 20:54 WIB.

---

<sup>4</sup> Patterick Wingers, "10 Years for the Rohingya Refugees, Past, Present, and Future". *Medicins Sans Frontieres*. Holland. March 2002. Dalam <http://www.doctorswithoutborders.org/publications/report/2002/rohingya> Report Pdf. diakses pada tanggal 10 Oktober 2018 pukul 14.43 WIB.

dituju dalam sebuah proses diplomasi. Disini penulis akan memaparkan bagaimana diplomasi Indonesia dalam penanganan konflik Rohingya dengan menggunakan jalur *Multi Track Diplomacy* dan dari 9 jalur tersebut. Penulis memilih tiga jalur yaitu *Track 1*, *Track 2* dan *Track 9*. Dimana *Track 1* yaitu aktor pemerintahan, *Track 2* non pemerintah, dan *Track 9* yaitu media massa. Rohingya sebagai etnis yang hak kemanusiaannya telah direbut oleh negara Myanmar tentunya menjadi topik pembicaraan yang hangat di dunia internasional saat ini, termasuk Indonesia yang menaruh kepedulian besar terhadap konflik Rohingya. Sebagai sesama negara yang terletak di kawasan ASEAN tentunya kabar ini sangat terdengar jelas oleh masyarakat Indonesia.

1. Hal ini membuat pemerintah Indonesia tidak tinggal diam dan melakukan upaya-upaya terhadap kasus ini. Dan karena itu sesuai dengan penjelasan tadi Rumusan Masalah dalam penulisan ini yaitu : **“Bagaimana Diplomasi Indonesia Dalam Penanganan Konflik Rohingya Tahun 2013-2017?”** dengan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sejarah dan dinamika terjadinya konflik rohingya, untuk mengetahui kebijakan myanmar terhadap etnis rohingya, untuk mengetahui Diplomasi yang dilakukan Indonesia dalam penanganan konflik Rohingya 2013-2017.

### **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan penjelasan atau gambaran suatu proses sesuatu terjadi. Tidak hanya untuk mendeskripsikan fakta tapi

juga menjelaskan apa yang terjadi. Disini penulis mendeskripsikan bagaimana sejarah dan dinamika konflik rohingya serta mendeskripsikan diplomasi indonesia dalam menangani kasus rohingya ini. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan data-data dalam berbagai sumber tulisan. Data-data dalam penulisan sangat berguna dalam pembuktian dari sebuah hipotesa dan pencarian jawaban. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan teknik library research, dengan memanfaatkan buku-buku, jurnal-jurnal dan artikel-artikel dari berbagai media seperti internet ataupun e-book, dan juga melakukan wawancara dengan beberapa narasumber.

### **Sejarah dan Dinamika Konflik Rohingya**

Sejarah tentang kehadiran etnis Rohingya ke Myanmar menjadi sangat penting dalam memahami konflik yang terjadi di wilayah Rakhine. Dalam sejarah tercatat sering terjadi konflik antara masyarakat muslim Rohingya dan juga masyarakat Budha di Rakhine. Dan juga setiap konflik tersebut menciptakan korban jiwa serta membuat terjadinya pengungsian dan perpindahan masal.

Sejarah konflik yang panjang ini dapat dibagi menjadi beberapa periode yaitu Rakhine periode sebelum masuknya Islam dan masyarakat Rohingya, Periode awal berdirinya kerajaan Muslim di Rakhine dan juga tentang kondisi ketika penjajahan Inggris, Jepang dan fase kemerdekaan.

Rohingya adalah sebuah kelompok etnis Indo-Arya dari Rakhine (juga dikenal sebagai Arakan, atau Rohang dalam bahasa Rohingya) di Myanmar. Rohingya adalah etno-linguistik yang berhubungan dengan bahasa bangsa

Indo-Arya di India dan Bangladesh (yang berlawanan dengan mayoritas rakyat Myanmar yang Sino-Tibet). Asal mula penyebutan etnis Rohingya dan bagaimana mereka bisa sampai ke Myanmar masih menjadi sejarah yang diperdebatkan hingga saat ini. Beberapa sejarawan mengatakan bahwa kata ‘Rohingya’ berawal dari bahasa arab “Rahma” yang berarti pengampunan

Kata ini merujuk pada cerita pedagang Arab yang terancam hukuman mati oleh Raja Arakan pada abad ke-18.<sup>5</sup> Namun, karena penduduk Arakan kesulitan untuk mengucapkan kata “Rahma” mereka justru menyebut “Raham”. Kemudian kata itu berubah menjadi “Rohang” dan akhirnya berubah menjadi “Rohingya”. Beberapa pihak mengatakan bahwa etnis Rohingya berasal dari Bangladesh dan lainnya mengatakan mereka datang dari negara bagian Rakhine di tenggara Myanmar<sup>6</sup> Rohingya awalnya diberi identitas atau kewarganegaraan berdasarkan ketentuan generasional. Beberapa orang Rohingya juga ada yang masuk di parlemen. Setelah kudeta militer 1966 di Myanmar, keadaan berubah secara drastis bagi Rohingya.

Rohingya tidak dianggap ke dalam 135 etnis resmi negara tersebut. Terutama setelah disahkannya Undang-

Undang Kewarganegaraan 1982 yang hanya mengakui kelompok etnis yang telah menetap di Myanmar sebelum tahun 1823 di mana etnis Rohingya tidak termasuk di dalamnya. Sebagaimana ditegaskan oleh pemerintah Myanmar bahwa:

“...*The 1982 citizenship law defines citizen as member of ethnic groups that have settled in Burma before 1823, the start of British Colonial rule in Burma. The Rohingya do not feature among the 135 national races listed by government and therefore rendered stateless.*”<sup>7</sup>

Semua warga negara diminta untuk mendapatkan kartu registrasi nasional. Rohingya, bagaimanapun, hanya diberi kartu identitas asing, yang membatasi pekerjaan dan kesempatan melanjutkan pendidikan. Sejatinya undang-undang tersebut menerapkan sistem tiga tingkat kewarganegaraan. Untuk mendapatkan tingkat yang paling dasar—yaitu naturalisasi—seseorang harus punya bukti bahwa keluarganya telah tinggal di Myanmar sebelum tahun 1948. Ia juga harus lancar melafalkan bahasa nasional. Sayangnya, banyak penduduk Rohingya yang tidak memenuhi dokumen tersebut, bisa karena tidak tersedia atau karena ditolak. Sebagai konsekuensinya, hak mereka untuk belajar, bekerja, bepergian, menikah, mempraktikkan agama, dan mengakses layanan kesehatan terus dibatasi. Mereka juga tidak bisa memberikan suara dalam pemilu. Jikapun mereka lolos ujian kewarganegaraan, mereka juga harus bersedia disebut sebagai “naturalisasi” dan menghilangkan identitas Rohingya-

<sup>5</sup> Bayu Azhari Ramadhani, 2014, *Peran OHCHR dalam Kasus Ham Yang Terjadi Pada Rohingya Di Myanmar Tahun 2012*, Skripsi, Jakarta: Ilmu Hubungan Internasional, UIN Syarif Hidayatullah, dalam repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/27610/1/BAYU%20AZHARI%20RAMADHANI-FISIP.pdf, diakses pada 25 April 2018 pukul 18:00 WIB.

<sup>6</sup> Wisnu Dewabrata, *Myanmar Masih Seperti Dulu*, dalam <http://internasional.kompas.com/read/2012/08/12/04045530/Myanmar.masih.seperti.dulu>, diakses pada 28 April 2018 pukul 00.10 WIB.

<sup>7</sup> Roni Bintang, *Asia's New Boat People*, dalam <http://www.reuters.com/news/picture/asia-new-boat-people?articleId=USRTX1DOG8>, diakses pada 30 April 2018 pukul 21.55 WIB.

nya. Dari data laporan *Human Right Watch* yang berjudul “*All you can do is pray, crimes againts humanity and ethnic cleansing of Rohingya Muslims in Burma’s Arakan State*” konflik ini dapat dilihat dari perang dunia II. Ketika masyarakat rohingya lebih setia dalam pimpinan kolonial inggris<sup>8</sup>

### **Kebijakan Myanmar Terhadap Etnis Rohingya**

Kebijakan yang dilakukan pemerintah Myanmar yang sangat membuat terkejut etnis rohingya yaitu dengan tidak mengakui kewarganegaraan rohingya pada tahun 1982. Rohingya juga dianggap bukan bagian warga negara Myanmar karena menurut Penduduk Mayoritas dan Pemerintah, Rohingya belum ada di Arakan sebelum tahun 1823. Itu artinya, Rohingya tidak dapat dikategorikan sebagai Warga Negara Myanmar menurut UU Kewarganegaraan 1982.<sup>9</sup> Hanya etnis Bengali di negara bagian Rakhine yang memenuhi syarat mendapatkan status warga negara, seperti tertuang dalam undang-undang kewarganegaraan 1982.

Undang-undang itu menegaskan bahwa etnis minoritas di Rakhine harus membuktikan mereka sudah tinggal di Myanmar sebelum 1823 untuk mendapatkan status kewarganegaraan Myanmar. Syarat ini secara efektif membuat etnis Rohingya tak bisa mendapatkan status warga negara Myanmar. Bahkan, Departemen

---

<sup>8</sup>Human Rights Watch, 2013, “All you can do is pray”, crimes againts humanity and ethnic cleansing of Rohingya Muslim in Burma”s Arakan State. Hal.22

<sup>9</sup>*Akar masalah pelanggaran ham di rohingya ada di Myanmar* dalam <http://suarajakarta.co/news/hukum/akar-masalah-pelanggaran-ham-rohingya-ada-di-myanmar/> diakses pada 10 Oktober 2018 pukul 22.50 WIB

Imigrasi Myanmar mengakui dalam sensus penduduk yang akan digelar untuk kali pertama selama tiga dekade terakhir, tidak mencantumkan etnis rohingya didalam dokumen sensus.<sup>10</sup>Seseorang akan diberikan kartu dengan warna yang berbeda berdasarkan status kewarganegaraannya yaitu, merah muda untuk *full citizenship*, biru untuk *associate citizenship*, dan hijau untuk *naturalized citizenship*.<sup>11</sup>pasal 44 dari undang-undang kewarganegaraan Myanmar menyebutkan bahwa untuk mendapatkan status kewarganegaraan Myanmar, seseorang minimal berumur 18 tahun, mampu berbahasa nasional Myanmar dengan baik, mempunyai karakter baik, berakal sehat dan berasal dari ras nasional Myanmar.<sup>12</sup> Namun, sulitnya memberikan bukti historis yang kuat menjadi penghambat etnis Rohingya untuk memperoleh status kewarganegaraan. Meskipun mampu melacak sejarah etnis Rohingya dari abad kedelapan, hukum negara Myanmar tidak mengakui etnis Rohingya sebagai salah satu ras nasional Myanmar.<sup>13</sup>

### **Diplomasi Yang Dilakukan Indonesia dalam Penanganan Konflik Rohingya 2013-2017**

---

<sup>10</sup>Myanmar Tolak Beri Status Kewarganegaraan untuk Etnis Rohingya dalam <https://internasional.kompas.com/read/2013/11/21/1933040/Myanmar.Tolak.Beri.Status.Warga.Negara.untuk.Etnis.Rohingya> diakses pada 10 Oktober 2018 pukul 23.00 WIB

<sup>11</sup>*Burma’s Citizenship Law*, dalam <http://www.refworld.org/docid/3ae6ad458.html>, diakses pada 10 Oktober 2018 pukul 23.45 WIB

<sup>12</sup>*Burma Citizenship Law-UN ACT*, dalam [unact.org/wp-content/uploads/2015/10/Myanmar-citizenship-law.pdf](http://www.unact.org/wp-content/uploads/2015/10/Myanmar-citizenship-law.pdf), diakses pada 11 Oktober 2018 pukul 00.30 WIB

<sup>13</sup>Anealla Safdar, *Who Are the Rohingya*, dalam <http://www.aljazeera.com/indepth/features/2015/10/Rohingya-151024202611276.html> diakses pada 11 Oktober 2018 pukul 00.45 WIB

Dan pada penelitian ini penulis menggunakan 3 *Track* yaitu *Track 1*, *Track 2*, dan *Track 9*. *Track 1* yaitu pemerintah dengan pemerintah yaitu Jalur pertama pemerintah sebagai pencipta perdamaian melalui diplomasi. Jalur ini memiliki tiga ciri, pertama pemerintah merupakan badan resmi yang memiliki kewenangan untuk bertanggung jawab dalam perdamaian<sup>14</sup>. Diplomasi merupakan sarana aktivitas penjaga perdamaian di level pemerintahan karena membutuhkan pemahaman baik antar negara agar mampu melakukan negosiasi atau menghadapi krisis dan konflik.

Kedua, pemerintah memiliki kuasa dalam menciptakan perdamaian terutama dalam kasus yang bersifat *high politics* karena dalam perumusan kebijakan memerlukan adanya *power*. Asumsi dasar diplomasi internasional ialah adanya *relative power*, dengan kekuatan politik suatu negara mampu mengontrol sumber daya, mengintervensi bahkan memengaruhi negara lain<sup>15</sup>. Ketiga, maka dalam proses tersebut pemerintah merupakan *vehicle of power* atau pembawa kekuatan. Negara kuat cenderung mengontrol negara lemah, sehingga suatu negara hendaknya berusaha mengontrol kekuatannya agar mampu mencapai tujuan nasionalnya. Pemerintah memiliki peran resmi dalam perdamaian sistem global sekarang berbeda dengan aktor non pemerintah. Kekurangan dari jalur ini potensi pemerintah untuk bertindak sewenang-wenang karena adanya *power* yang berbeda tiap negara. Kelebihannya pemerintah mampu memobilisasi sumberdaya secara cepat

untuk mendukung kebijakan politiknya<sup>16</sup>

Selanjutnya *Track 2 Jalur* kedua yaitu non pemerintah atau professional sebagai pencipta perdamaian dalam resolusi konflik. Jalur ini meliputi sejumlah upaya perdamaian melalui aktor professional non pemerintah yang berasal dari para ahli yang kebanyakan memiliki tingkat intelektual yang tinggi atau pakar di lapangan. Tujuan jalur kedua untuk membantu penanggulangan konflik dengan peningkatan komunikasi, pemahaman dan kolaborasi untuk membagi pemecahan masalah<sup>17</sup>. Dengan begitu diharapkan aktor non pemerintah mampu mengetahui akar konflik sehingga mampu mengeksplor solusi yang tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kegiatan jalur ini selain resolusi konflik juga sebagai mediator, konsultan, pembina, pelatih, agen diplomasi privat non formal, analis dsb. Dalam implementasinya jalur ini menuai beberapa kritik salah satunya bagaimana jalur kedua memungkinkan dan mengatur proses resolusi konflik secara sistematis<sup>18</sup>. Hal ini didasari individu dalam jalur ini terdiri dari latar belakang berbeda sehingga tingkat efektivitas terutama dalam pembagian peran cenderung dikhawatirkan menjadi overlap, namun kendala utama dari jalur ini ialah uang dan tidak adanya legitimasi. Kelemahan jalur ini ialah rawan resiko karena tidak teregulasi dengan baik sedangkan kelebihanannya mampu menciptakan solusi konkret yang kreatif yang tidak mampu dilakukan oleh pemerintah.

Jalur kesembilan yaitu komunikasi dan media, perdamaian melalui informasi dengan berbagai

---

<sup>14</sup>*Ibid* hal. 27

<sup>15</sup>*Ibid*hal 26

---

<sup>16</sup>*Ibid* hal 33

<sup>17</sup>*Ibid* Hal 37

<sup>18</sup>*Ibid* Hal 40

macam bentuk seperti cetak, elektronik, visual dsb mempengaruhi publik terkait isu perdamaian, resolusi konflik dan hubungan internasional<sup>19</sup>. Media mampu membentuk opini publik yang dapat diakses bebas dan tersebar di masyarakat yang mana berdampak pada pemerintah selaku pembuat keputusan. Terdapat tiga kategori komunikasi meliputi laporan berita, media edukasi dan media komunikasi elektronik. Informasi sekarang dapat diakses dengan mudah, murah dan dengan berbagai cara karena kemajuan perkembangan teknologi. Press merupakan aktor penting dalam jalur ini sebab perannya dalam perubahan global. Contoh CNN merupakan pelopor perubahan antara press dan komunitas diplomasi internasional, karena kantor CNN berlokasi diseluruh belahan dunia dengan laporan 24 jam sehingga menjadikannya sumber utama berita internasional. Kekurangan jalur ini ialah kekuatan mampu mengontrol kebenaran informasi dan kelebihanannya masyarakat mampu memahami kondisi atau isu tertentu.

Dari ketiga *Track* inilah penulis berusaha untuk meneliti penanganan Indonesia dalam konflik Rohingya dengan melakukan diplomasi-diplomasi yang sudah dijalankan oleh Indonesia. Ketiga *Track* ini dirasa cocok oleh penulis dalam membantu proses penanganan konflik etnis ini yang tidak berkesudahan. Indonesia sendiri juga sudah sangat lama berkomitmen untuk membantu penyelesaian konflik ini apalagi sejak awal konflik yang meledak di tahun 2012, Indonesia sudah membantu Myanmar sudah sejak proses demokratisasi ketika Myanmar pada masa Isolasi dan hingga konflik ini pun Indonesia tetap komit untuk

---

<sup>19</sup> *Ibid* Hal 120

membantu<sup>20</sup> Dalam *Track 1* ini penulis mendapatkan data langsung dari Kementerian Republik Indonesia dalam proses diplomasi yang dilakukan Indonesia untuk penyelesaian konflik Rohingya, data ini diberika oleh narasumber yaitu fungsional diplomat dan berikut data- data yang didapatkan<sup>21</sup> :

1. Indonesia telah memberikan bantuan Kepada Myanmar sejak pecahnya konflik komunal di Rakhine State 2012.
2. Sebelumnya sejak tahun 2013, Indonesia telah memberikan komitmen bantuan secara inklusive kepada Myanmar antara lain Pemberian bantuan kemanusiaan berupa: 10 kontainer bantuan kemanusiaan yang dilepas oleh Presiden RI tanggal 29 Desember 2017 dari Jakarta dan diserahkan oleh Menlu RI di Yangon tanggal 21 Januari 2017, pendirian 6 sekolah yang diresmikan dalam 2 tahap yaitu bulan Desember 2014 (4 sekolah) dan 21 Januari 2017 (2 sekolah), rencana pendirian Indonesia Health Center di desa Myaung Bywe, Rakhine State.
3. Di saat yang sama, Indonesia juga terus mendorong keterlibatan ASEAN sebagai satu keluarga dan komunitas untuk mendukung Pemerintah Myanmar dalam menyelesaikan isu tersebut dengan spirit solidaritas ASEAN. Dalam pertemuan Menlu ASEAN disela-sela UNGA, telah disepakati bahwa

---

<sup>20</sup> Hasil Wawancara dengn Ibu Dian Komalasari selaku Fungsional Diplomat di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Pada 19 Maret 2018 di Kantor Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

<sup>21</sup> Diplomasi Kemanusiaan, Narasi 2 hasil wawancara dengan Ibu Dian dari Kementerian Luar Negeri.

- Myanmar akan membuka akses bantuan bagi negara ASEAN melalui ASEAN Humanitarian AIDS (AHA) Center
4. Untuk Tanggap Darurat, Indonesia telah memberikan bantuan kepada pengungsi dari Rakhine State baik yang berada di Myanmar maupun yang berada di Bangladesh melalui mekanisme G to G. Total bantuan Indonesia untuk pengungsi dan IDP's di Myanmar saat ini mencapai 94 ton yang dikirim dengan 10 pesawat (8 untuk Bangladesh dan 2 untuk Myanmar).
  5. Dua Kerjasama utama yang tidak pernah berhenti dilakukan Indonesia, adalah :
    - Program *capacity building* terkait isu demokrasi, penghormatan hak asasi manusia, tata pemerintahan yang baik.
    - Pembangunan Rakhine State secara inklusif, dimana semua anggota komunitas memiliki hak yang sama
  6. Aktivitas diplomasi yang aktif dan kontributif: pertemuan Presiden RI dengan Daw Aung San Suu Kyi (DASSK) disela-sela KTT ASEAN di Mamila, tanggal 28 April 2017, dimana Presiden RI menyampaikan komitmen Indonesia untuk membantu Myanmar dalam program kerja sama yang inklusif untuk jangka panjang dan menengah
  7. Untuk tahapan selanjutnya yaitu rehabilitasi, Pemerintah Indonesia akan bekerja dengan masyarakat melalui Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM) dalam bentuk program *Humanitarian Assistance for Sustainable Community* (HASCO) di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, termasuk klinik bergerak (mobil ambulans). Peluncuran program HASCO dan penandatanganan komitmen bantuan dari 11 Ormas, yang tergabung dalam AKIM, dilakukan pada tanggal 31 Agustus 2017 dihadapan Menlu RI. Komitmen tersebut untuk jangka waktu 2017-2019 dan total berjumlah US\$ 2 juta. Akim terdiri dari aliansi 11 lembaga kemanusiaan di Indonesia yang terdiri dari Muhammadiyah Disaster Management Centre, Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim – Nahdlatul Ulama, PKPU Human Initiative, Dompot Dhuafa, Rumah Zakat, Dompot Peduli Ummat – Daarut Tauhiid, LAZIS Wahdah, Laznas Lembaga Manajemen Infaq (LMI), Aksi Cepat Tanggap, Lazis Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, Social Trust Fund – UIN Jakarta
  8. Pertemuan Menlu RI dengan DASSK pada tanggal 4 September 2017 dimana Menlu RI menyampaikan proposal Indonesia untuk dapat menyelesaikan masalah kemanusiaan di Rakhine State secara komprehensif dan bermartabat. Pendekatan konstruktif Indonesia secara konsisten diarahkan untuk mendorong penyelesaian isu tersebut melalui pemberian bantuan kemanusiaan, dukungan terhadap pembangunan inklusif, serta konsolidasi demokrasi di Myanmar. Pembangunan Rumah Sakit Indonesia yang dibangun MER-C, PMI, Walubi di Rakhine. Proyek pembangunan ini langkah sinergi antara Kemlu Indonesia dengan koalisi 11 lembaga swadaya masyarakat dan organisasi Indonesia, yang tergabung dalam Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM). Rumah sakit ini akan dibangun di Desa Muang Bwe, Kota Mrauk U, sebuah kota kecil berjarak 80 kilometer sebelah timur laut dari Sittwe, ibu kota Negara Bagian

Rakhine. Penggagas kehadiran rumah sakit ini adalah MER-C<sup>22</sup>. Dalam *Track 2* ini penulis mendapatkan data dari beberapa NGO yang berperan cukup aktif untuk membantu proses penanganan konflik Rohingya tahun 2013-2017 dan penulis juga mendapatkan kegiatan apa saja yang telah NGO Indonesia ini lakukan dalam proses penanganan Konflik Rohingya pada tahun 2013-2017. Namun disini penulis mengambil 2 NGO yang berperan aktif dalam penanganan konflik Rohingya yaitu ACT (Aksi Cepat Tanggap) dan *MER-C (MEDICAL EMERGENCY RESCUE COMMITTEE)*. salah satu kegiatan yang dilakukan ACT dalam penanganan kasus ini yaitu peresmian Kapal Kemanusiaan ACT untuk Rohingya yang diberangkatkan pada tanggal 21 September 2017 yang berisi 2000 Ton beras, dimana program ini diresmikan oleh Menteri Sosial Republik Indonesia, Ibu Khofifah Indar Parawansa dan kesediaan beliau dalam melepas keberangkatan Kapal Kemanusiaan ini di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.

MER-C sendiri melakukan beberapa tahapan dalam penanganan konflik ini yaitu tahap pertama Tim Medis Pertama ke Myanmar yang terdiri dari 2 dokter spesialis, 2 dokter umum dan 1 tenaga logistic yang bertugas hingga 19 September 2012. Tahap kedua yaitu pada 16 – 26 Februari 2015, MER-C mengirimkan Tim ke-2 ke Myanmar yang terdiri dari 1 dokter spesialis penyakit dalam, 2 dokter umum, 2 perawat dan 2 tenaga logistik. Tim MER-C mengunjungi 7 kamp dari 15 kamp yang ada di Sittwe. Dan pada tahap ketiga Tim ke-3 MER-C untuk Myanmar berjumlah tiga orang relawan,

yaitu dr. Joserizal Jurnalis, SpOT selaku Ketua Tim, Drs. Ichsan Thalib dari Divisi Konstruksi MER-C dan dr. Tonggo Meaty Fransisca relawan yang telah mengikuti dua kali misi kemanusiaan ke wilayah ini.

Pada track selanjutnya yaitu track 9 media massa. Dimana media massa mampu menggerakkan publik untuk memberikah perhatian lebih terhadap kasus Rohingya ini. Dengan inisiatif dan interaktif pemberitaan antar media, publik dunia pun dibangunkan untuk memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan etnis Rohingya ini. Beragai ragam respon pun muncul seperti, demonstrasi dan menggalang dana kemanusiaan.

Tugas dan peran sosial dan etis media di era modern yang terus berusaha untuk terlibat dalam membawa dan menumbuhkan kehidupan di tengah masyarakat. Adalah tugas dan peran media dalam mencari solusi damai dan turut menciptakan keadilan serta memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan di era modern.

Dan media massa Indonesia dari hari ke hari semakin tampil pada garda yang cukup sentral dan strategis untuk mengekspose dan mengelola peristiwa kemanusiaan dalam tragedi berdarah di Myanmar tersebut untuk dikerjakan lagi oleh sesama bangsa lain atau publik dunia internasional. Tugas media dalam situasi konflik adalah ikut mencari solusi menenangkan situasi dan menciptakan perdamaian. Menciptakan perdamaian adalah salah satu ekspresi tanggung jawab moral media terhadap masyarakat. Media membantu kedua belah pihak yang berkonflik untuk menemukan kebenaran substansial di balik konflik berdarah itu. Media massa harus bertindak sebagai penuntun atau pencari kebenaran yang tersembunyi di balik konflik untuk kemudian dapat

---

<sup>22</sup> MER-C, PMI, dan Walubi Membangun RS Indonesia di Rakhine <https://tirto.id/mer-c-pmi-dan-walubi-membangun-rs-indonesia-di-rakhine-cv8r> diakses 30 Mei 2018 Pukul 00.40 WIB

menyalahkan obor perdamaian bagi para pihak yang bertikai.

## Kesimpulan

Etnis Rohingya merupakan etnis yang paling menderita di dunia oleh sebab itu masyarakat dunia harus berperan besar dalam membantu penyelesaian konflik ini. Sebagai etnis yang tidak mempunyai kewarganegaraan etnis rohingya sudah sepatasnya mendapatkan hak asasi mereka dan bisa hidup dengan layak dan damai.

Permasalahan yang tiada hentinya membuat Indonesia yang merupakan negara asean dan bertetangga dengan Myanmar mengambil langkah untuk membantu dalam penanganan konflik ini. Konflik ini sudah selayaknya dan sepatasnya menjadi prioritas dunia internasional dalam menyelesaikan masalah etnis ini.

Atas desakan masyarakat Indonesia dan untuk menciptakan keadilan dunia maka Indonesia pun ikut serta dalam penanganan konflik ini. Dari penelitian yang dilakukan penulis dengan menggunakan *Multi Track Diplomacy* disini dugaan sementara yang diberikan penulis yaitu Indonesia melakukan Bantuan Kemanusiaan dengan indikator yang sudah tercantum bahwa *multi track diplomacy* yang digunakan penulis yaitu *track 1* pemerintah dengan pemerintah, *track 2 NGO*, dan *track 9* media massa sesuai dengan indikator yang telah dipaparkan maka Indonesia memang telah melakukan bantuan kemanusiaan sesuai dengan semua indikator, hipotesa serta teori yang digunakan.

Para relawan kemanusiaan tidak berpotensi untuk mendamaikan pihak-pihak yang berkonflik, melainkan hanya memikirkan mencari cara bagaimana supaya bantuan bisa mengalir kepada

korban Ini adalah tugas pertama begitu organisasi kemanusiaan tiba di lokasi bantuan.

Pada penelitian ini penulis menyatakan bahwa Indonesia memang telah berupaya melakukan bantuan kemanusiaan dengan menggunakan *Track 1, Track 2, dan Track 9*. Terlihat bagaimana semua dari ketiga *track* tersebut telah terbukti dilakukan Indonesia dalam menangani konflik ini tetapi untuk penyelesaian konflik ini karena terdapat asas non intervensi maka Indonesia hanya menangani, untuk proses penyelesaian tentu negara Myanmar lah yang akan mengambil keputusan sebagaimana hasil dari penyelesaian konflik dinegara tersebut. Akan tetapi semua yang telah dilakukan Indonesia terbukti adanya dan dengan menggunakan ketiga *track* tersebut penulis menyatakan bahwa Indonesia telah melakukan bantuan kemanusiaan untuk membantu penanganan konflik rohingya ini.

## Daftar Pustaka

### Jurnal :

Aye Chan, 2005. the Development of a Muslim Enclave in Arakan (Rakhine) State of Burma (Myanmar)", SOAS Bulletin of Burma Research, Vol. 3, NO.2, Autumn, ISSN 1479- 8484.

Joko, Tri. 2013. *Konflik Tak Seimbang Etnis Rohingya dan Etnis Rakhine di Myanmar*, Jurnal Transnasional Vol. 4 No. 2

### Buku :

Holsty. K.J. 1992. *International Politics : A Framework For Analysis Sixth Edition*. New Jersey : Prentice. Hall.

Human Rights Watch, 2013, "All you can do is pray", c

rimes againts humanity and ethnic cleansing of Rohingya Muslim in Burma"s Arakan State

**Website :**

*Akar masalah pelanggaran ham di rohingya ada di Myanmar*

dalam  
<http://suarajakarta.co/news/hukum/akar-masalah-pelanggaran-ham-rohingya-ada-di-myanmar/>  
diakses pada 10 Oktober 2018 pukul 22.50 WIB

Anealla Safdar, *Who Are the Rohingya*, dalam  
<http://www.aljazeera.com/indepth/features/2015/10/Rohingya-151024202611276.html> diakses pada 11 Oktober 2018 pukul 00.45 WIB

[http://ji-indonesia.com/pipermail/annuur\\_ji-indonesia.com/2009-February/001364.html](http://ji-indonesia.com/pipermail/annuur_ji-indonesia.com/2009-February/001364.html)  
diakses pada 30 Desember 2017 pukul 20:54 WIB.

Bayu Azhari Ramadhani, 2014, *Peran OHCHR dalam Kasus Ham Yang Terjadi Pada Rohingya Di Myanmar Tahun 2012*, Skripsi, Jakarta: Ilmu Hubungan Internasional, UIN Syarif Hidayatullah, dalam repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/27610/1/BAYU%20AZHARI%20RAMADHANI-FISIP.pdf, diakses pada 25 April 2018 pukul 18:00 WIB.

*Burma Citizenship Law-UN ACT*, dalam [un-act.org/wp-content/uploads/2015/10/Myanmar-citizenship-law.pdf](http://un-act.org/wp-content/uploads/2015/10/Myanmar-citizenship-law.pdf), diakses pada 11 Oktober 2018 pukul 00.30 WIB

*Burma's Citizenship Law*, dalam <http://www.refworld.org/docid/3ae6ad458.html>, diakses pada 10 Oktober 2018 pukul 23.45 WIB

MER-C, PMI, dan Walubi Membangun RS Indonesia di Rakhine

<https://tirto.id/mer-c-pmi-dan-walubi-membangun-rs-indonesia-di-rakhine-cv8r>  
diakses 30 Mei 2018 Pukul 00.40 WIB

Myanmar Tolak Beri Status Kewarganegaraan untuk Etnis Rohingya dalam <https://internasional.kompas.com/read/2013/11/21/1933040/Myanmar.Tolak.Beri.Status.Warga.Negara.untuk.Etnis.Rohingya> diakses pada 10 Oktober 2018 pukul 23.00 WIB

Patterick Wingers, "10 Years for the Rohingya Refugees, Past, Present, and Future"

. Medicins Sans Frontieres. Holland. March 2002. Dalam <http://www.doctorswithoutborder.org/publication/report/2002/rohingya> Report Pdf. diakses pada tanggal 10 Oktober 2018 pukul 14.43 WIB.

Roni Bintang, *Asia's New Boat People*, dalam <http://www.reuters.com/news/picture/asias-new-boat-people?articleId=USRTX1DOG8>, diakses pada 30 April 2018 pukul 21.55 WIB.

Wisnu Dewabrata, *Myanmar Masih Seperti Dulu*, Dalam <http://internasional.kompas.com/read/2012/08/12/04045530/Myanmar.masih.seperti.dulu>, diakses pada 28 April 2018 pukul 00.10 WIB.